

Refleksi *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Krisis Legitimasi Elite Modern

Muh. Abdul Ghafur¹, Muh. Wafdan Asyiari², Kurniati³

Hukum Tata Negara, Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Indonesia^{1,2,3}

*Email: 10200124170@uin-alauddin.ac.id¹, 10200124138@uin-alauddin.ac.id²,
kurniati@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRACT

Sejarah Artikel:

Diterima 02-07-2026
Disetujui 08-07-2026
Diterbitkan 10-07-2026

The legitimacy crisis of modern elites is an increasingly evident issue in contemporary constitutional practice, where power obtained legally through democratic procedures is not always followed by substantive public acceptance and trust. This research aims to analyse the root causes of the modern elite legitimacy crisis and to reflect on it through the perspective of siyasah syar'iyah as an ethical-normative framework within fiqh siyasah. This study employs normative legal research of the library research type, using a statutory-conceptual and comparative-conceptual approach, analysed descriptively and qualitatively through content analysis. The findings indicate that the modern elite legitimacy crisis fundamentally stems from a gap between procedural and substantive legitimacy, marked by weak accountability, expanding oligarchy, and democratic formalism without substance. The siyasah syar'iyah perspective offers five evaluative principles: amanah and al-mas'uliyah al-ijtima'iyah, syura as the basis of participatory legitimacy, al-'adalah as a measure of substantive legitimacy, the maxim tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah, and hisbah as a mechanism of social control. This research concludes that strengthening these substantive values within state practice may serve as a solution for restoring the ethical and social legitimacy of modern elites, without necessarily rejecting the framework of modern democracy itself.

Keywords: siyasah syar'iyah; legitimacy; elite crisis; amanah; hisbah

ABSTRAK

Krisis legitimasi elite modern merupakan persoalan yang semakin nyata dalam praktik ketatanegaraan kontemporer, di mana kekuasaan yang diperoleh secara sah melalui prosedur demokratis tidak selalu diikuti oleh penerimaan dan kepercayaan substantif dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar persoalan krisis legitimasi elite modern serta merefleksikannya melalui perspektif siyasah syar'iyah sebagai kerangka etis-normatif dalam fiqh siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis kepustakaan (library research), menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif-konseptual, serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis legitimasi elite modern pada dasarnya bersumber dari kesenjangan antara legitimasi prosedural dan legitimasi substantif, yang ditandai dengan lemahnya akuntabilitas, meluasnya oligarki, dan formalisme demokrasi tanpa substansi. Perspektif siyasah syar'iyah menawarkan lima prinsip evaluatif, yaitu amanah dan al-mas'uliyah al-ijtima'iyah, syura sebagai basis legitimasi partisipatif, al-'adalah sebagai ukuran legitimasi

substantif, kaidah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah, serta hisbah sebagai mekanisme kontrol sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan nilai-nilai substantif tersebut ke dalam praktik bernegara dapat menjadi solusi bagi pemulihan legitimasi elite modern secara etis dan sosial, tanpa harus menolak kerangka demokrasi modern itu sendiri.

Katakunci: siyasah syar'iyah; legitimasi; krisis elite; amanah; hisbah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ghafur, M. A., Asyari, M. W. ., & Kurniati, K. (2026). Refleksi Siyasah Syar'iyah Terhadap Krisis Legitimasi Elite Moderen. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 7653-7662. <https://doi.org/10.63822/n0ysgb08>

PENDAHULUAN

Legitimasi kekuasaan merupakan salah satu prasyarat mendasar bagi keberlangsungan sebuah pemerintahan yang stabil dan berwibawa. Sebuah rezim yang kehilangan legitimasi, betapapun kuatnya secara institusional, cenderung rentan terhadap resistensi sosial, ketidakpatuhan publik, dan pada gilirannya krisis politik yang berkepanjangan. Fenomena ini semakin relevan untuk dicermati dalam konteks kepemimpinan elite modern, di mana proses pengisian jabatan publik telah menempuh mekanisme demokratis yang sah secara prosedural, namun tidak jarang tetap diiringi oleh menurunnya kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap para pemegang kekuasaan tersebut.(Ardiyansyah et al., 2025)

Gejala krisis legitimasi elite modern dapat diamati melalui berbagai indikator, di antaranya meluasnya sikap apatisisme politik, menguatnya sentimen anti-elite di ruang publik, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara, serta maraknya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang serius antara legitimasi prosedural, yang diperoleh melalui mekanisme elektoral yang sah, dengan legitimasi substantif, yang seharusnya tercermin dari kinerja, integritas, dan keberpihakan elite terhadap kepentingan rakyat.(Afrilia Era Vazir, 2026)

Ilmu politik modern, melalui pemikiran Max Weber, telah lama mengidentifikasi bahwa otoritas legal-rasional semata tidak cukup untuk menjamin penerimaan sosial yang utuh terhadap sebuah kekuasaan. Namun demikian, kerangka teori politik konvensional tersebut kerap kali berhenti pada analisis struktural-prosedural, tanpa menyentuh dimensi etis dan moral yang menjadi akar persoalan legitimasi itu sendiri. Di sinilah kajian terhadap siyasah syar'iyah, sebagai salah satu cabang fiqh yang secara khusus membahas pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan dalam perspektif hukum Islam, menjadi relevan untuk dihadirkan sebagai pisau analisis alternatif.(Setiawan Pratama & Khalid, 2025)

Siyasah syar'iyah menawarkan kerangka normatif yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata sebagai hak yang diperoleh melalui prosedur formal. Prinsip-prinsip seperti syura (musyawarah), al-'adalah (keadilan), al-mas'uliyah al-ijtima'iyah (tanggung jawab sosial), serta mekanisme hisbah sebagai instrumen kontrol sosial memberikan tolok ukur substantif untuk menilai legitimasi seorang pemimpin atau elite penguasa, yang tidak sepenuhnya tercakup dalam teori legitimasi konvensional.(Akhmad Zaki Yamani, 2025)

Beberapa kajian terdahulu telah membahas persoalan legitimasi kekuasaan, baik dari perspektif ilmu politik maupun perspektif fiqh siyasah secara terpisah. Namun demikian, kajian yang secara khusus merefleksikan krisis legitimasi elite modern melalui kerangka siyasah syar'iyah secara komprehensif masih relatif terbatas. Kekosongan inilah yang berupaya diisi oleh penelitian ini, dengan menghadirkan analisis yang memadukan diagnosis persoalan legitimasi elite modern dengan tawaran solusi normatif dari perspektif fiqh siyasah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini disusun untuk menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana bentuk dan akar persoalan krisis legitimasi yang dihadapi oleh elit modern dalam konteks ketatanegaraan kontemporer? Bagaimana perspektif siyasah syar'iyah merefleksikan dan menawarkan kerangka evaluatif terhadap krisis legitimasi elit modern tersebut?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akar persoalan krisis legitimasi elite modern serta merumuskan tawaran perspektif siyasah syar'iyah sebagai kerangka etis-normatif dalam

menilai dan mengevaluasi legitimasi kekuasaan, sehingga dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan kajian hukum tata negara Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, konsep, dan doktrin hukum melalui penelusuran berbagai bahan pustaka yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif (*statute approach* dan *conceptual approach*) yang dipadukan dengan pendekatan komparatif-konseptual, yakni membandingkan serta mengaitkan konsep legitimasi kekuasaan dalam teori politik modern dengan konsep legitimasi dalam perspektif siyasah syar'iyah. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fiqh siyasah klasik dan kontemporer, antara lain karya Ibn Taimiyyah berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, karya Ibn Qayyim al-Jauziyyah *al-Thuruq al-Hukmiyyah*, serta karya Abdul Wahhab Khallaf *al-Siyasah al-Syar'iyah*. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur ilmu politik yang membahas teori legitimasi, khususnya pemikiran Max Weber mengenai otoritas legal-rasional, sebagai bahan pendukung dalam analisis komparatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menelaah berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian, baik yang berasal dari kitab fiqh siyasah, peraturan perundang-undangan, maupun literatur politik kontemporer yang membahas krisis legitimasi elite. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan content analysis (analisis isi), yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengkaji konsep-konsep legitimasi dalam siyasah syar'iyah untuk kemudian direfleksikan terhadap fenomena krisis legitimasi elite modern. Analisis juga dilakukan secara komparatif guna menemukan persamaan dan perbedaan antara konsep legitimasi dalam teori politik modern dan fiqh siyasah, sehingga dapat dirumuskan suatu perspektif yang bersifat elaboratif, relevan, dan aplikatif dalam menjawab persoalan legitimasi kekuasaan di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Siyasah Syar'iyah sebagai Kerangka Analisis

Siyasah syar'iyah dapat dipahami sebagai kebijakan atau tindakan pengaturan kekuasaan yang, meskipun tidak selalu diatur secara nash (tekstual) dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetap harus berorientasi pada terwujudnya maslahah 'ammah (kemaslahatan umum) dan sejalan dengan maqashid al-syar'i'ah. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kerusakan termasuk bagian dari siyasah syar'iyah, sekalipun tidak ditetapkan secara eksplisit oleh Rasulullah dan tidak diturunkan wahyu mengenainya. (Nur Wahida Md Tahaa, Betania Kartika Muflih, 2025)

Kerangka ini menempatkan legitimasi kekuasaan bukan semata-mata pada prosedur formal (misalnya pemilihan umum atau pengangkatan), melainkan pada dua pilar utama sebagai berikut.

- Legitimasi sumber (masyru'iyah al-mashdar) kekuasaan diperoleh melalui cara yang sah dan disetujui, seperti baiat, syura, atau mekanisme lain yang disepakati bersama.
- Legitimasi kinerja (masyru'iyah al-mumarah) kekuasaan dijalankan sesuai amanah, keadilan, dan tujuan menyejahterakan rakyat. (Setiawan Pratama & Khalid, 2025)

Poin kedua inilah yang menjadi pisau analisis utama dalam membedah krisis legitimasi elite modern, sebab banyak elite yang secara prosedural sah, namun kehilangan legitimasi substantif akibat penyalahgunaan amanah yang diembannya.

Sejalan dengan konsep tersebut, penerapan siyasah syar'iyah dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut agar setiap kebijakan negara berlandaskan pada prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan umum. Kebijakan yang diambil oleh penguasa harus diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, menciptakan kesejahteraan, serta mencegah terjadinya kemudharatan. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan amanah secara bertanggung jawab, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Salam et al., 2021)

Berdasarkan konsep tersebut, dapat dipahami bahwa siyasah syar'iyah menawarkan kerangka yang komprehensif dalam menilai legitimasi kekuasaan. Legitimasi tidak berhenti pada aspek legal-formal, melainkan harus dibuktikan melalui praktik pemerintahan yang berorientasi pada keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, krisis legitimasi elite modern pada dasarnya bukan hanya disebabkan oleh persoalan prosedur politik, tetapi juga oleh kegagalan elite dalam mewujudkan nilai-nilai substantif yang menjadi tujuan pemerintahan menurut syariat Islam.

Dalam konteks demokrasi modern, pendekatan siyasah syar'iyah tetap memiliki relevansi karena mampu menjadi instrumen evaluasi etis terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Seorang pemimpin yang memperoleh jabatan melalui mekanisme yang sah belum tentu memiliki legitimasi yang utuh apabila kebijakan dan tindakannya justru merugikan masyarakat, mengabaikan prinsip keadilan, atau menyalahgunakan amanah. Dengan demikian, konsep siyasah syar'iyah menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan harus diukur dari sejauh mana tujuan kemaslahatan (maqashid al-syari'ah) benar-benar diwujudkan dalam kehidupan bernegara, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terpelihara dan krisis legitimasi dapat diminimalkan.

Krisis Legitimasi Elite Modern: Diagnosis Persoalan

Krisis legitimasi elite modern merupakan salah satu persoalan utama dalam sistem politik kontemporer yang ditandai oleh menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pemegang kekuasaan. Fenomena ini muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara harapan publik dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh elite politik. Salah satu faktor yang paling sering memicu krisis legitimasi adalah kesenjangan antara janji politik yang disampaikan pada masa kampanye dengan realisasi kebijakan setelah memperoleh kekuasaan. Kondisi tersebut menimbulkan apa yang disebut sebagai *representation gap*, yaitu jarak antara kepentingan rakyat yang seharusnya diwakili dengan kebijakan yang benar-benar dihasilkan oleh pemerintah. Selain itu, berkembangnya praktik oligarki dan kapitalisasi politik turut memperkuat krisis legitimasi karena proses pengambilan keputusan sering kali lebih mengakomodasi kepentingan kelompok elite ekonomi dan politik tertentu dibandingkan kebutuhan

masyarakat secara luas. Akibatnya, masyarakat mulai memandang bahwa kekuasaan tidak lagi dijalankan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, melainkan untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi (Sami an & Prakasa, 2021).

Krisis legitimasi juga semakin diperparah oleh rendahnya akuntabilitas publik yang tercermin dalam berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara secara material, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan pemerintahan. Dalam banyak kasus, demokrasi akhirnya hanya dijalankan pada tataran prosedural melalui pemilihan umum dan mekanisme hukum formal, tanpa disertai tanggung jawab moral dan sosial yang memadai dari para elite terhadap rakyat. Situasi ini menunjukkan bahwa legitimasi tidak dapat dibangun hanya melalui kepatuhan terhadap prosedur hukum semata. Teori legitimasi yang dikemukakan oleh Max Weber mengenai otoritas legal-rasional menjelaskan bahwa kekuasaan memang memperoleh keabsahan melalui aturan dan hukum yang berlaku, namun legitimasi tersebut akan melemah apabila tidak disertai penerimaan sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan suatu pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, tetapi juga oleh kemampuannya menghadirkan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum sehingga memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat secara berkelanjutan. (Mahda et al., 2025)

Dalam perspektif siyasah syar'iyah, keberadaan elite dalam sistem pemerintahan tidak hanya dituntut untuk memiliki legitimasi formal, tetapi juga harus mampu menjalankan amanah kekuasaan secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Ketika elite politik tidak mampu mewujudkan prinsip tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, maka kepercayaan publik akan menurun dan pada akhirnya memperkuat terjadinya krisis legitimasi. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga bersifat moral dan substantif dalam perspektif etika politik Islam. (Syahrul et al., 2023)

krisis legitimasi elite modern bukan sekadar disebabkan oleh lemahnya sistem politik, tetapi juga oleh menurunnya kualitas kepemimpinan dalam menjalankan amanah. Masyarakat saat ini tidak hanya menilai pemimpin dari cara mereka memperoleh kekuasaan, tetapi juga dari kebijakan, integritas, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik. Ketika pemimpin gagal memenuhi harapan masyarakat, kepercayaan publik akan terus menurun meskipun secara hukum kedudukannya tetap sah.

Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan harus dibangun melalui keseimbangan antara legalitas dan moralitas. Seorang pemimpin dituntut untuk menjalankan kekuasaan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab demi tercapainya kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penyelesaian krisis legitimasi tidak cukup hanya dengan memperbaiki mekanisme politik atau hukum, tetapi juga memerlukan komitmen para elite untuk menerapkan nilai-nilai amanah, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan cara tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan dan legitimasi kekuasaan dapat terjaga secara berkelanjutan.

Refleksi Siyasah Syar'iyah terhadap Krisis Legitimasi Elite Modern

Dari perspektif siyasah syar'iyah, krisis legitimasi elite modern dapat dipahami sebagai konsekuensi dari melemahnya penerapan nilai-nilai dasar pemerintahan yang telah digariskan dalam ajaran Islam. Dalam fiqh siyasah, kekuasaan tidak dipandang sebagai hak istimewa yang melekat pada individu

atau kelompok tertentu, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar, baik secara sosial kepada rakyat maupun secara spiritual kepada Allah SWT. Ketika jabatan publik digunakan sebagai sarana untuk memperkaya diri, memperluas pengaruh politik, atau melindungi kepentingan kelompok tertentu, maka hakikat amanah tersebut telah dilanggar. Kondisi inilah yang sering menjadi akar munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap elite politik. (Hakiki, 2022) Selain itu, siyasah syar'iyah menempatkan prinsip syura sebagai salah satu fondasi legitimasi kekuasaan. Syura menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah yang terbuka dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam realitas politik modern, partisipasi masyarakat sering kali hanya dibatasi pada proses pemilihan umum yang berlangsung secara periodik, sementara keterlibatan publik dalam pengawasan dan perumusan kebijakan setelah pemilihan masih relatif terbatas. Akibatnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin renggang sehingga legitimasi kekuasaan mengalami penurunan. (Jadidah, 2025)

Selain prinsip amanah dan syura, siyasah syar'iyah juga menjadikan keadilan sebagai ukuran utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu kekuasaan secara substantif. Legitimasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur hukum atau mekanisme politik yang berlaku, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Seorang pemimpin yang terpilih secara sah dapat kehilangan legitimasi moral apabila kebijakan yang diambil tidak mampu menjawab kebutuhan rakyat atau justru memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. (Fida' Munadzir, et al., 2025). Sejalan dengan perspektif siyasah syar'iyah, legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh proses memperoleh kekuasaan, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan kepemimpinan yang mencerminkan nilai amanah, kompetensi, akuntabilitas, dan orientasi pada kemaslahatan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi ukuran substantif dalam menilai keberhasilan seorang pemimpin menjalankan amanah publik. Dengan demikian, kepemimpinan yang mengabaikan nilai-nilai tersebut berpotensi kehilangan kepercayaan masyarakat meskipun memiliki legitimasi secara hukum atau prosedural (Saputra et al., 2025).

Pandangan ini sejalan dengan kaidah fiqh siyasah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*, yang menegaskan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemimpin harus selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Kaidah tersebut menjadi instrumen evaluatif untuk menilai apakah kebijakan yang dibuat benar-benar ditujukan bagi kepentingan umum atau hanya menguntungkan kelompok tertentu. Di samping itu, konsep *amar ma'ruf nahi munkar* yang diwujudkan melalui mekanisme hisbah memberikan dasar normatif bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Melalui prinsip ini, masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk mengoreksi penyimpangan, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh elite. Dengan demikian, siyasah syar'iyah menawarkan kerangka legitimasi yang tidak hanya bertumpu pada legalitas formal, tetapi juga pada amanah, keadilan, partisipasi, kemaslahatan, dan kontrol sosial yang berkelanjutan, sehingga mampu menjadi alternatif konseptual dalam menjawab krisis legitimasi elite modern. (Zamroni et al., 2026)

siyasah syar'iyah tidak hanya memberikan konsep mengenai bagaimana kekuasaan diperoleh, tetapi juga menjadi pedoman tentang bagaimana kekuasaan harus dijalankan. Krisis legitimasi yang terjadi pada elite modern menunjukkan bahwa legalitas formal saja tidak cukup untuk mempertahankan

kepercayaan masyarakat. Seorang pemimpin harus mampu membuktikan komitmennya melalui kebijakan yang adil, transparan, serta benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. Apabila nilai-nilai tersebut tidak diwujudkan, maka legitimasi akan semakin melemah meskipun pemimpin tersebut memperoleh kekuasaan melalui mekanisme yang sah.

nilai-nilai yang terkandung dalam siyasah syar'iyah, seperti amanah, syura, keadilan, dan kemaslahatan, masih sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan saat ini. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi pedoman bagi para pemimpin dalam menjalankan tanggung jawabnya sekaligus menjadi dasar bagi masyarakat untuk menilai kualitas kepemimpinan. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah tidak hanya mampu memperkuat legitimasi pemerintahan, tetapi juga dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap elite politik sehingga tercipta pemerintahan yang lebih adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Relevansi terhadap Konteks Ketatanegaraan Kontemporer

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip-prinsip yang terkandung dalam siyasah syar'iyah memiliki relevansi yang kuat untuk memahami dan menganalisis berbagai persoalan yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai fenomena yang berkembang dalam kehidupan politik nasional, seperti menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan eksekutif, maraknya praktik dinasti politik, serta terjadinya korupsi yang bersifat sistematis dan struktural, menunjukkan adanya tantangan serius terhadap legitimasi kekuasaan. Meskipun para pemegang jabatan publik memperoleh kewenangan melalui mekanisme yang sah menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan, legitimasi tersebut tidak selalu sejalan dengan tingkat penerimaan masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat menilai bahwa kekuasaan yang dijalankan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum. Akibatnya, muncul ketidakpercayaan yang dapat mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan melemahkan hubungan antara negara dengan warga negara.(Romdhloni, 2025)

Dalam situasi tersebut, siyasah syar'iyah menawarkan suatu kerangka etis dan normatif yang dapat digunakan untuk melengkapi kerangka hukum tata negara positif yang berlaku di Indonesia. Perspektif ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem hukum nasional ataupun ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan memberikan dimensi moral dalam menilai kualitas penyelenggaraan kekuasaan. Melalui prinsip amanah, keadilan, syura, kemaslahatan, serta pengawasan sosial terhadap pemegang kekuasaan, siyasah syar'iyah menekankan bahwa legitimasi tidak hanya bersumber dari prosedur hukum dan mekanisme demokrasi formal, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam memenuhi kepentingan rakyat secara adil dan bertanggung jawab. Dengan demikian, suatu pemerintahan yang sah secara konstitusional tetap dituntut untuk menjaga integritas, memperkuat akuntabilitas, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat agar memperoleh legitimasi substantif. Oleh karena itu, nilai-nilai siyasah syar'iyah dapat menjadi landasan konseptual yang penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik di Indonesia.(Patra & Mustafa, 2026)

Meskipun Indonesia bukan negara yang menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan hukum Islam, prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan bersifat universal serta

sejalan dengan nilai-nilai yang dianut dalam sistem demokrasi dan konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut dapat menjadi pedoman moral bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

upaya mengatasi krisis legitimasi tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan regulasi atau mekanisme politik, tetapi juga memerlukan komitmen dari para pemimpin untuk menerapkan nilai-nilai etika dalam setiap kebijakan yang diambil. Apabila prinsip-prinsip siyasah syar'iyah dapat diimplementasikan secara konsisten, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat. Dengan demikian, terciptanya pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat bukan hanya menjadi tujuan demokrasi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam siyasah syar'iyah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, krisis legitimasi elite modern pada hakikatnya bersumber dari kesenjangan antara legitimasi prosedural, yang diperoleh melalui mekanisme elektoral yang sah, dengan legitimasi substantif, yang seharusnya tercermin dari kinerja, integritas, dan keberpihakan elite terhadap kepentingan rakyat. Kesenjangan ini termanifestasi dalam bentuk representation gap, oligarki dan kapitalisasi politik, trust deficit akibat korupsi dan nepotisme, serta formalisme demokrasi yang kehilangan substansi pertanggungjawaban moral.

Kedua, perspektif siyasah syar'iyah menawarkan kerangka evaluatif yang bersifat etis-normatif terhadap krisis tersebut, melalui lima prinsip utama, yaitu: amanah dan al-mas'uliyah al-ijtima'iyah yang menempatkan kekuasaan sebagai tanggung jawab, bukan hak milik; syura sebagai basis legitimasi partisipatif yang bersifat berkelanjutan; al-'adalah sebagai ukuran legitimasi substantif berbasis keadilan distributif; kaidah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah sebagai instrumen evaluasi kebijakan; serta hisbah sebagai mekanisme kontrol sosial yang memberikan landasan moral-religius bagi pengawasan masyarakat terhadap elite.

Ketiga, siyasah syar'iyah tidak dimaksudkan untuk menggantikan kerangka hukum tata negara positif maupun sistem demokrasi modern, melainkan untuk melengkapinya dengan dimensi etis dan moral yang selama ini kurang tersentuh oleh teori legitimasi konvensional. Pemulihan legitimasi elite modern, dengan demikian, tidak cukup dilakukan melalui perbaikan prosedur semata, tetapi memerlukan penguatan nilai-nilai substantif berupa amanah, syura, keadilan, dan hisbah dalam praktik penyelenggaraan negara.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek kajian kepustakaan yang bersifat konseptual, sehingga disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan kajian empiris guna menguji relevansi dan penerapan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah tersebut dalam praktik ketatanegaraan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Afrilia Era Vazir. (2026). Demokrasi Dalam Cengkeraman Oligarki : Tantangan Keadilan Dalam Sistem Politik Indonesia Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(3), 928–934.

- Akhmad Zaki Yamani. (2025). Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasaah Di Negara Mayoritas Muslim. *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(1), 20–39. <https://doi.org/10.62196/nfs.v4i1.75>
- Ardiyansyah, A., Muttaqien, A., Saputra, T. Y., & Umar, M. (2025). Runtuhnya Ketatanegaraan dan Krisis Demokrasi: Korupsi dan Pudarnya Keadilan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(7), 5829–3827.
- Fida' Munadzir, Ganang Prihatmoko, & AA Hubur. (2025). KAJIAN SIYASAH SYAR'IYYAH PADA PROSES KEPEMIMPINAN (Tinjauan Komparatif antara Sistem Indonesia dan Arab Saudi). *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 6(1), 17–31. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v6i1.175>
- Hakiki, Y. R. (2022). Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>
- Jadidah, A. (2025). Interdisciplinary Explorations in Research Kepemimpinan Transformasional Emil Dardak. 3, 857–879.
- Mahda, A. S., Zumrodah, A., Daud, K. I., & Anshori, M. I. (2025). Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1957.
- Nur Wahida Md Tahaa, Betania Kartika Muflih, M. A. J. (2025). Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 4(1), 1–8.
- Patra, A. A. A., & Mustafa, A. (2026). Eksistensi Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Perspektif Siyasaah Syariaah. 7982–7989.
- Romdhloni, K. F. (2025). Analisis Nilai Kepemimpinan Fiqih Siyasaah Dalam Praktik Politik Dinasti Di Indonesia. *Jurnal Cerdah Hukum*, 3(2), 216–230.
- Salam, A. A., Kurniati, K., & Kahfi, A. (2021). Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasaah Syar'Iyyah. *Siyasatuna*, 2(2), 244–260.
- Sami an, S. an, & Prakasa, S. U. W. (2021). Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 329–345. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.11737>
- Saputra, Kurniati., Islam, U., & Alauddin, N. (2025). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR ' IYYAH: ANTARA REPRESENTASI SIMBOLIK DAN SUBSTANSI. 6(3), 421–435.
- Setiawan Pratama, D., & Khalid. (2025). Legitimasi Publik Dan Tuntutan Pemakzulan Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Perspektif Siyasaah Dusturiyah. *LEX STRICTA (Jurnal Ilmu Hukum)*, 3(3), 228.
- Syahrul, Kurniati, & Arif Rahman. (2023). ELIT PENENTU DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH Studi Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaah Syar'iyah*, 4(3), 237–248.
- Zamroni, M., Rahmanita, R. A., Esa, A., Zahra, A., & Hasana, F. W. (2026). Analisis Kaidah Tasharruf Al-Imam ' Ala Al- Ra ' iyyah Manuthun Bil Maslahah dalam Perspektif Qowaidh Fiqh Siyasaah masyarakat , tetapi juga sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral , sosial , dan. (April).